

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Al-Mamun et al, (2014). makalah ini menguji hubungan antara karakteristik komite audit dan kinerja perusahaan antara perusahaan publik di Malaysia. Penelitian ini menggunakan EVA sebagai alat ukur kinerja. Sampel penelitian 75 tahun perusahaan dan mencakup tahun fiskal 2008-2010. Studi ini menemukan bahwa independensi komite audit berhubungan positif dengan kinerja perusahaan sedangkan kualitas audit berhubungan negatif di Malaysia. Secara keseluruhan, karakteristik komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Studi ini memberikan kontribusi untuk literatur serta bukti empiris tentang karakteristik komite audit dan kualitas audit perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 perusahaan besar memiliki dampak negatif pada pengukuran berbasis nilai di Malaysia.

Habbash (2016). Penelitian ini untuk mengetahui praktik pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan potensi pengaruh *Corporate Governance* (CG), struktur kepemilikan, dan karakteristik perusahaan, di negara Arab yang sedang berkembang, Arab Saudi. Studi ini memperluas literatur yang ada dengan menyelidiki penyebab pengungkapan CSR di negara yang kekurangan penelitian di bidang ini. Studi ini meneliti 267 laporan tahunan perusahaan non-keuangan-terdaftar Saudi selama 2007-2011 menggunakan konten manual dan analisis regresi berganda dan daftar periksa dari 17 item pengungkapan CSR berdasarkan ISO 26000. Analisis menemukan bahwa rata-rata pengungkapan CSR adalah 24%, lebih tinggi dari 14.61% dan 16% ditemukan oleh Al-Janadi et al. (2013).

Macarulla dan Talalweh (2012) untuk dua sampel Saudi selama 2006-2007 dan selama 2008, masing-masing. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh penerapan kode Saudi CG pada tahun 2007. Analisis juga menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah dan keluarga, ukuran perusahaan, dan usia perusahaan merupakan

determinan positif dari pengungkapan CSR, leverage perusahaan merupakan determinan negatif, sedangkan AC efektif, dewan komisaris independensi, dualitas peran, kepemilikan institusional, profitabilitas perusahaan, dan jenis industri ditemukan tidak menjadi penentu pengungkapan CSR. Studi ini penting karena menggunakan teori keagenan untuk memastikan pengaruh karakteristik dewan tertentu dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan. Akibatnya, ini memberikan implikasi penting bagi regulator CG dan pemangku kepentingan yang berbeda dan memberikan evaluasi kode Saudi CG yang baru-baru ini diterapkan dari perspektif pengungkapan CSR.

Tobing, et al (2019) meneliti apakah adanya pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan dan *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017 dengan metode purposive sampling diperoleh 30 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Dalam penelitian ini *corporate governance* akan diproyeksikan dengan komite audit dan dewan komisaris independen. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa komite audit memiliki signifikan sebesar 0,307. Tingkat signifikan tersebut lebih besar dari taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil ini dapat disebabkan karena rapat-rapat yang diselenggarakan oleh komite audit kurang efektif, kurangnya kompetensi dari komite audit sehingga tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik. Sedangkan hasil penelitian dewan komisaris independen didapatkan bahwa dewan komisaris independen memiliki signifikan sebesar 0,124. Tingkat signifikan tersebut lebih besar dari taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report*. Tidak berpengaruhnya dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report* dimungkinkan karena komisaris independen belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Khoiriyah, et al (2020) dengan penelitian pengaruh *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap *sustainability report*. Dalam penelitian ini *corporate governance* diproyeksikan dengan ukuran komite audit dan dewan direksi. Penelitian ini dilakukan dengan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018, dengan metode penelitian kuantitatif yang menggunakan software aplikasi SPSS ver.20. Dengan hasil uji t sebagai berikut : Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,008 < 0,05$, Maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Sustainability Report*. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,016 < 0,05$, Maka jawaban dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh Dewan Direksi terhadap *Sustainability Report*.

Hasanah, et al (2015) meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Jenis dari penelitian ini adalah asosiatif dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa *annual report* dan *sustainability report* yang diperoleh dari BEI. Dalam penelitian ini *corporate governance* akan diproyeksikan dengan dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit. Hasil dari penelitian ini adalah variabel independen yakni dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa masing- masing variabel independenya rata-rata tingkat kehadiran anggota dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit dalam rapat tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hal ini disebabkan pada saat rapat, pembahasan lebih dititik beratkan pada kinerja perusahaan yang pengungkapannya bersifat wajib. Sehingga untuk pembahasan mengenai pengungkapan *sustainability report* tidak diutamakan.

Sofa dan Respati (2020), meneliti pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report*. Penelitian ini menggunakan data penelitian yang diambil dari perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI pada tahun 2017 didapatkan sebanyak 89 perusahaan sampel dari hasil *purposive sampling* yang dilakukan oleh penelitian ini. Hasil dari penelitian ini

adalah adanya pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan *sustainability report*, Seringnya rapat yang diadakan dewan direksi terbukti akan meningkatkan efektivitas komunikasi antar anggota direksi sehingga GCG yang diterapkan dan keterbukaan informasi perusahaan juga meningkat. Pengujian menunjukkan dewan komisaris tidak mempengaruhi *sustainability report*. Dewan komisaris sebagai dewan pengawas memiliki tugas utama melindungi kepentingan pemegang saham dan mengawasi kinerja direksi melalui aspek keuangan sehingga tidak dapat dibuktikan berpengaruh langsung terhadap luasnya pengungkapan *sustainability report*. Komite audit sebagai komite yang berfungsi memperkuat pengawasan komisaris terhadap perusahaan memiliki tugas utama yaitu menindak lanjuti temuan auditor internal yang berhubungan dengan pelaporan keuangan. Komite audit dalam menjalankan tugasnya berfokus menyelesaikan temuan-temuan audit serta menelaah pengaduan dalam perusahaan dan tidak berfokus pada luas pengungkapan *sustainability report* secara langsung.

Ching1, (2013) Keberlanjutan perusahaan sangat penting untuk kesuksesan perusahaan jangka panjang dan untuk memastikan pasar memberikan nilai di seluruh masyarakat, dan meskipun penting, tidak ada konsensus yang jelas mengenai apakah kinerja keuangan perusahaan terkait dengan kinerja keberlanjutan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memverifikasi apakah kualitas pelaporan keberlanjutan akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (CFP) di antara perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indeks Keberlanjutan Perusahaan (ISE) dan untuk memeriksa kualitas informasi yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan (SR) mereka. Sampel terdiri dari semua perusahaan yang terdaftar di BEI untuk periode 2008 hingga 2014. Studi ini mempertimbangkan indikator akuntansi dan berbasis pasar dan variabel kontrol. Tidak ada konsensus yang jelas mengenai apakah kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar dalam indeks keberlanjutan berkaitan dengan kinerja keberlanjutan mereka. Temuan utamanya adalah sebagai berikut: Tidak ada hubungan antara akuntansi dan variabel berbasis pasar dan kualitas pelaporan, dan meskipun kualitas pengungkapan meningkat selama tahun-tahun

penelitian, skornya masih rendah. Ini juga berlaku dalam tiga dimensi keberlanjutan. Kami tidak mengetahui adanya studi yang meneliti hubungan antara CFP dan kualitas pelaporan keberlanjutan, dan ini adalah kontribusi utama.

Mohammadi et al, (2018) Artikel ini telah menerima perhatian kritis yang cukup besar bahwa upaya untuk meningkatkan pengungkapan keberlanjutan pada dasarnya dapat membuat penilaian pasar perusahaan kemajuan. Ini bertujuan untuk memberikan tingkat pengungkapan keberlanjutan perusahaan yang diatur sesuai dengan tujuh subjek inti dari Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 26000 dan item pengungkapan energi, kemudian ditetapkan untuk menilai efektivitas pelaporan keberlanjutan pada perusahaan yang terdaftar valuasi pasar selama periode 2010-2015. Untuk mencapai tujuan ini, data dikumpulkan dari sampel 98 organisasi manufaktur dan jasa Iran dari berbagai sektor industri di Bursa Efek Teheran dan pendekatan metode generalisasi momen (GMM) dilakukan untuk data panel dinamis untuk mengevaluasi efek keberlanjutan. tingkat pelaporan pada penilaian pasar perusahaan terdaftar. Dilihat dari hasilnya, secara keseluruhan luas pengungkapan keberlanjutan diatur sesuai dengan rendahnya tingkat pelaporan keberlanjutan bagi emiten di TSE. Ditemukan juga bahwa perusahaan yang sensitif memiliki tingkat pengungkapan keberlanjutan perusahaan yang lebih besar daripada perusahaan lain. Selain itu, pelaporan keberlanjutan telah terbukti terkait dengan penilaian pasar di mana perusahaan yang aktif di industri sensitif lingkungan dengan pelaporan keberlanjutan memiliki penilaian pasar yang lebih tinggi daripada perusahaan yang aktif di industri non-sensitif dengan pelaporan keberlanjutan. Aspek praktik pengungkapan keberlanjutan kami bersama dengan item pengukuran dasarnya dapat diterapkan sebagai daftar periksa untuk menilai seberapa baik praktik pengungkapan keberlanjutan dilakukan di TSE.

Madona dan Khafid (2020) meneliti *corporate governance* terhadap *sustainability report* dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Dengan *corporate governance* akan diproyeksikan dengan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manjerial. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan

populasi dari penelitian ini adalah perusahaan tambang yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017 yaitu 41 perusahaan. Sampel dari penelitian ini yang didapatkan dari purposive sampling ini adalah 33 perusahaan, analisis penelitian ini dibantu dengan aplikasi SPSS 23. Dengan hasil penelitian variabel proporsi komisaris independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan SR. Hal tersebut menunjukkan bahwa artinya, semakin tinggi jumlah proporsi komisaris independen dalam perusahaan maka akan semakin rendah perusahaan dalam mengungkapkan SR. Variabel komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan SR. Nilai konstantanya adalah positif yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara komite audit dan pengungkapan SR. Variabel kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan SR. Nilai konstantanya adalah positif yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan SR.

Masud, et al (2020) meneliti efek dari *corporate governance* pada *sustainability report* bukti empiris dari negara-negara Asia Selatan. *Corporate governance* akan diproyeksikan dengan *Foreign ownership, Institutional ownership, Director ownership, Family ownership, Board independence, Board size, Board diversity, Board committee*. Dengan hasil penelitian *Board independence* dan *Board size* secara positif berpengaruh terhadap *sustainability report*. Penelitian ini menemukan bukti bahwa lebih banyak ESRP dikaitkan dengan lebih banyak direktur independen. Secara kolektif, temuan penelitian ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa kepemilikan struktur (kepemilikan asing, kelembagaan, dan direktur) dan karakteristik dewan (dalam ketergantungan dan ukuran) berdampak pada kinerja pelaporan keberlanjutan lingkungan. Studi kami memiliki kontribusi teoretis dan manajerial, karena berkontribusi pada pemangku kepentingan yang beragam serta manajemen di negara-negara SA yang berkaitan dengan lingkungan keputusan investasi dan peraturan kebijakan. Secara teoritis, kami menggunakan perbedaan seperangkat teori untuk menghubungkan tata kelola perusahaan dengan keputusan pengungkapan informasi lingkungan. Studi sebelumnya umumnya menggunakan

teori ketergantungan agensi dan sumber daya untuk lebih menjelaskan tata kelola perusahaan dan pemangku kepentingan, dan teori legitimasi untuk membahas praktik pengungkapan. Teori biaya politik juga digunakan dalam penjelasan ESRP perusahaan.

Whetman. (2017) Dengan menggunakan sampel perwakilan yang dikumpulkan dari 95 perusahaan Amerika yang diperdagangkan secara publik dari berbagai sektor pada 2015-2016, saya memeriksa bagaimana pelaporan keberlanjutan perusahaan memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. peneliti menemukan efek positif dan signifikan dari pelaporan keberlanjutan pada pengembalian ekuitas, pengembalian aset, dan margin laba perusahaan di tahun berikutnya. Namun, hubungan ini hanya ditemukan pada perusahaan dengan kepemilikan institusional rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan akan menjadi penggunaan sumber daya perusahaan yang bermanfaat untuk subset perusahaan ini. Lebih lanjut, pelaporan keberlanjutan perusahaan terbukti menjadi pengganti yang efektif untuk pemantauan oleh investor institusi.

Aprilia (2018) Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance Structure*, *Sustainability Reporting Disclosure*, dan Firm Value terhadap Economic Value Added sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari periode 2010-2015 untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Alat pengolah data menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan sedangkan Ukuran Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Ukuran Direksi dan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Economic Value Added dan Firm Value, namun Economic Value Added bukan merupakan variabel intervening antara Ukuran Direksi dan Ukuran Dewan Komisaris. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Economic Value Added, tetapi Economic Value added merupakan variabel intervening antara Komisaris Independen dengan Nilai Perusahaan. Komite Audit

tidak berpengaruh terhadap Economic Value Added dan Firm Value, tetapi Economic value added merupakan variabel intervening antara Komite Audit dan Nilai Perusahaan. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap Economic Value Added dan Firm Value, namun Economic value added merupakan variabel intervening antara Kepemilikan Manajerial dengan Nilai Perusahaan. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Economic Value Added dan Economic Value Added bukan merupakan variabel intervening antara Kepemilikan Institusional dengan Nilai Perusahaan. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan berpengaruh terhadap Economic Value Added dan Firm Value.

Saputra (2016) teori pemangku kepentingan, perusahaan tidak hanya mempertimbangkan pemegang saham tetapi juga pemegang saham, semua yang memiliki kepentingan dalam bisnis. Perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak hanya memperhatikan aspek keuangan tetapi juga aspek non keuangan. Aspek non finansial seperti lingkungan dan sosial merupakan aspek lain disamping aspek ekonomi. Aspek ekonomi sebagian besar hanya mempertimbangkan perencanaan jangka pendek daripada aspek lingkungan dan sosial yang mempertimbangkan perencanaan jangka menengah dan panjang. Indonesia memiliki masalah yang sama terkait lingkungan, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator pasar modal dan pemerintah membuat beberapa regulasi. Perusahaan harus melaporkan semua kegiatan bisnis yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial. Berdasarkan GRI 4.0, salah satu standar yang digunakan di dunia, evaluasi tentang perusahaan juga mempertimbangkan tiga aspek, yaitu: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Indonesia turut berkontribusi dalam mewujudkan dunia yang lebih baik dengan perusahaan hijau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan beberapa regulasi. Tujuan penelitian ini adalah mencoba mengidentifikasi tata kelola perusahaan sebagai elemen penting dalam pembuatan pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan, khususnya yang terdaftar di BEI. Kami menggunakan analisis deskriptif dengan perusahaan sampel yang terdaftar di BEI dengan variabel tata kelola perusahaan, seperti: karakteristik dewan, regulasi dan masalah pelaporan

keberlanjutan oleh GRI 4.0. Hal yang menarik sebagai temuan awal, belum banyak perusahaan yang terdaftar di BEI membuat laporan terkait pelaporan keberlanjutan. Tata kelola perusahaan, salah satu variabel yang dipertimbangkan perusahaan untuk membuat pelaporan keberlanjutan. Pelaporan keberlanjutan adalah masalah penting di dunia. Triple Bottom Line (TL) berbasis dunia yang didirikan oleh Elkington (1997) mencoba membuat dunia “baru” yang lebih memperhatikan lingkungan dan sosial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan sosial (diproksikan dengan: sustainability reporting) akan semakin memiliki perspektif publik yang baik dan dalam jangka waktu yang lama dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Aprilia (2018) menguji pengaruh *Good Corporate Governance Structure*, *Sustainability Reporting Disclosure*, dan *Firm Value* terhadap *Economic Value Added* sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari periode 2010-2015 untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Alat pengolah data menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan sedangkan Ukuran Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Ukuran Direksi dan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Economic Value Added dan Firm Value, namun Economic Value Added bukan merupakan variabel intervening antara Ukuran Direksi dan Ukuran Dewan Komisaris. , Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Economic Value Added*, tetapi *Economic Value added* merupakan variabel intervening antara Komisaris Independen dengan Nilai Perusahaan. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Economic Value Added dan Firm Value, tetapi *Economic value added* merupakan variabel intervening antara Komite Audit dan Nilai Perusahaan. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *Economic Value Added* dan Firm Value, namun Economic value added merupakan variabel intervening antara Kepemilikan Manajerial dengan Nilai Perusahaan. Kepemilikan

Institusional tidak berpengaruh terhadap *Economic Value Added* dan *Economic Value Added* bukan merupakan variabel intervening antara Kepemilikan Institusional dengan Nilai Perusahaan. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan berpengaruh terhadap *Economic Value Added* dan *Firm Value*.

Panjaitan (2017) Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh tata kelola perusahaan dan laporan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan entitas, dan laporan tata kelola perusahaan dan keberlanjutan pada entitas pasar dengan visibilitas politik sebagai variabel moderasi. Laporan keberlanjutan diukur dengan variabel dummy oleh *Corporate Governance Scorecard* dengan Indonesian Institute for *Corporate Directorship* (IICD). Kemudian, kinerja keuangan yang diukur dengan rasio profitabilitas (ROA) dan Rasio Likuiditas (CR), serta kinerja pasar diukur menggunakan Tobin's Q. Sedangkan visibilitas politik diukur dengan log total aset. Analisis data menggunakan metode Path Analysis dengan Structural Equation Modeling (SEM). Analisis menunjukkan empat hasil dengan menggunakan visibilitas politik sebagai variabel moderasi. Pertama, kualitas tata kelola perusahaan mempengaruhi kinerja keuangan. Kedua, kualitas tata kelola perusahaan mempengaruhi Tobin's Q. Ketiga, laporan keberlanjutan berpengaruh terhadap Return on Assets dan current ratio. Terakhir, laporan keberlanjutan juga memengaruhi Tobin's Q.

Triwacananingrum, et al. (2020) Menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksikan oleh komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, komite tata kelola, dan Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan profitabilitas, dan leverage terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, dengan menggunakan metode regresi logistik kuantitatif dan sampel yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dari data laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang diterbitkan tahun 2018 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), diperoleh 249 sampel penelitian. Hasil penelitian ini adalah komite audit dan komite tata kelola menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, sedangkan dewan komisaris

independen, kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan leverage tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Hasanah et al, (2015) Penelitian menguji Pengaruh Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Laporan Keberlanjutan Laporan Pengungkapan. Sampel berjumlah 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di PT 2013 dengan teknik purposive sampling. Data dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa rata-rata tingkat kehadiran dewan komisaris, direksi dan komite audit dalam rapat tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi. laporan keberlanjutan.

Aliniar (2017). Penelitian ini menguji pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) dan ukuran perusahaan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pengungkapan *sustainability report* yang diproksikan dengan *Sustainability Reporting Index* (SRI), sedangkan variabel independennya adalah ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham terkonsentrasi dan ukuran perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dan diperoleh sebanyak 32 sampel amatan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel proporsi komisaris independen dan kepemilikan saham institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*, sedangkan variabel ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan saham terkonsentrasi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

Aziz (2014) Penelitian ini menganalisis faktor karakteristik Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi kualitas

pengungkapan laporan keberlanjutan/ *Sustainability Report* (SR) pada Laporan keberlanjutan atau Sustainability Report perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Faktor-faktor karakteristik *Good Corporate Governance* yang digunakan antara lain ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen, ukuran Komite Audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham terkonsentrasi, dan ukuran perusahaan. Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan di Indonesia yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun 2011 hingga 2012. Total sampel penelitian adalah 15 perusahaan yang ditentukan melalui *purposive sampling*. Penelitian ini menganalisis pada laporan tahunan perusahaan dengan metode *Content analysis*. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan SR di Indonesia, sedangkan ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen, ukuran Komite Audit, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham terkonsentrasi, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan SR di Indonesia.

Aniktia dan Khafid (2015) Penelitian menganalisis pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, *governance committee*, profitabilitas, dan leverage terhadap pengungkapan *sustainability report*. Populasi penelitian adalah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2013. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 246 sampel. Alat analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit, *governance committee* dan leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan kualitas *sustainability report* dengan menggunakan sampel perusahaan dari sektor yang sama.

Sari dan Marsono (2013) Pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia sudah meninggalkan tahap awal. Saat ini jumlah korporasi yang mengungkapkan laporan keberlanjutan meningkat dari periode sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2009-2011. Pemilihan sampel ini menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan metode purposive sampling, sampel perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan sebanyak 23 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi komite audit dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap laporan keberlanjutan. Sedangkan likuiditas, leverage, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan belum berpengaruh penuh terhadap laporan keberlanjutan.

Widyaningsih (2018) Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR dalam memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial, institusional, komisaris independen dan komite audit dengan nilai perusahaan serta firm size sebagai variabel kontrol pada perusahaan pertambangan periode 2015-2016 yang terdaftar di BEI. Sampel penelitian terdiri atas 56 perusahaan dan dipilih secara purposive sampling (dengan kriteria tertentu). Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian dengan regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan, kepemilikan manajerial (MOWN), kepemilikan institusional (INST), komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV). Secara parsial, kepemilikan manajerial dan komite audit yang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan variabel bebas lainnya (kepemilikan institusi dan komisaris independen) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada analisis variabel moderating dengan metode uji interaksi Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa

secara simultan pengungkapan CSR dapat memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial, institusi, komisaris independen serta komite audit terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, adanya variabel pengungkapan CSR dapat menguatkan atau memoderasi secara signifikan hubungan antara kepemilikan manajerial, institusi serta komite audit terhadap nilai perusahaan. Namun dapat memoderasi atau menguatkan tetapi tidak signifikan hubungan antara komisaris independen terhadap nilai perusahaan. Firm size sebagai variabel kontrol perlu dipertahankan karena berpengaruh positif signifikan pada kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi, komisaris independen, serta komite audit terhadap nilai perusahaan.

Idah (2013) *Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Dalam Pengungkapan Sustainability Report*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran dewan komisaris, komite audit, dewan direksi, governance committee, profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report. Sampel penelitian adalah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode penelitian tahun 2010 sampai 2011. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 122 pengamatan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi, governance committee, profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki peran positif terhadap pengungkapan sustainability report. Sedangkan, dewan komisaris, komite audit, likuiditas, leverage dan aktivitas perusahaan tidak memiliki peran terhadap pengungkapan sustainability report.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Agency Teori

Teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami isu *good corporate governance* dan *earning management*. Agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep *good corporate governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih

sehat. Penerapan *good corporate governance* berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak.

Agen sebagai pihak yang bertugas untuk mengelola perusahaan mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas perusahaan, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Di sisi lain, prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen. Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri informasi (*asymmetric information*). Oleh karena itu, pengertian Asimetri informasi adalah kondisi dimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lain. Misalnya pihak manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak investor dipasar modal. Tingkat asimetri informasi ini bervariasi dari sangat tinggi ke sangat rendah Wulandari (2017).

Agency theory (teori agensi), atau yang biasa disebut *contracting theory* merupakan salah satu aliran riset akuntansi terpenting dewasa ini. Penilaian atas teori agensi bisa bersifat deduktif atau induktif dan merupakan kasus khusus riset perilaku, meskipun teori agensi berakar pada bidang keuangan dan ekonomika bukannya psikologi dan sosiologi. Asumsinya adalah individu bertindak demi kepentingan sendiri. Asumsi lainnya menyebutkan bahwa entitas merupakan tempat atau titik pertemuan bagi berbagai jenis hubungan kontraktual yang terjadi diantara manajemen, pemilik, kreditor, dan pemerintah. Oleh karena itu, teori agensi berfokus pada biaya-biaya pemantauan dan penyelenggaraan hubungan antar berbagai pihak (Bastian, 2006:213).

Agency theory (teori agensi), yaitu teori yang menyatakan mengenai pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada

tenaga profesional (*agent*) yang lebih mengerti dan profesional dalam menjalankan bisnis (Hutabarat dan Huseini, 2006:47). Ketika terdapat pemisahan antara pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*) di suatu perusahaan, maka terdapat kemungkinan bahwa keinginan pemilik diabaikan. Fakta ini, dan kesadaran bahwa agen itu mahal, menetapkan landasan bagi sekelompok gagasan rumit namun bermanfaat yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*) (Pearce dan Robinson, 2008:47). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai berikut:

“Agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana prinsipal memerintah agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut memiliki tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan perintah sesuai kepentingan prinsipal.

Ada kemungkinan manajer selaku agen dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadinya, berlawanan dengan upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Maka dalam pelaksanaannya sering terjadi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan tersebut, diperlukan suatu penerapan mekanisme yang dapat melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).

Pemegang saham yang merupakan *principal* mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham. Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti ini adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik *principal*. Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan *principal* dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan

pribadi, hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang.

2.2.2 Corporate Governance

2.2.3 Konsep Corporate Governance

Corporate Governance menjadi suatu topik ataupun isu dalam dunia bisnis yang sedang hangat dibicarakan diseluruh dunia pada penghujung abad 20 dan awal abad 21 ini. Tidak kurang dari badan-badan organisasi duani seperti World Bank dan *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) ikut merintis konsep-konsep *corporate governance*. Namun demikian esensi dari *corporate governance* itu sendiri belum banyak diketahui oleh kebanyakan orang maupun para pelaku bisnis di Indonesia. Bahkan di negara kita, istilah *governance* itu sendiri belum memiliki padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Istilah yang saat ini dianggap mewakili adalah “Tata Kelola” (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2006).

Menurut Bank Indonesia dalam PBI No.11/13/PBI/2009, *Good Corporate Governance* (GCC) adalah salah satu tata kelola bank yang menerapkan prinsip prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan konsep tentang praktek tata kelola yang baik dalam suatu institusi yang di dalamnya terdapat lima prinsip diatas yang perlu dilaksanakan oleh sebuah institusi.

Kaihatu (2006) menyebutkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Konsep ini menekankan pada dua hal yakni, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan

untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Zarkasyi (2008:12), *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) demi tercapainya tujuan perusahaan. Sedangkan Herawaty (2008) menyebutkan bahwa *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham.

2.2.4 Prinsip dalam Corporate Governance

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Usaha Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, maka dapat diketahui tujuan dari penerapan prinsip-prinsip GCG antara lain:

1. Penerapan prinsip-prinsip GCG untuk memaksimalkan nilai BUMN agar BUMN memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, sehingga tujuan BUMN dapat dicapai.
2. Agar BUMN dalam menjalankan usahanya dapat dijalankan secara professional, transparan, efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ-organ perusahaan.
3. Agar setiap keputusan yang diambil dilandasi oleh nilai moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan-kepentingan para stakeholder (melindungi hak stakeholder).
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.

2.2.5 Manfaat *Good Corporate Governane*

Menurut Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dalam Sari (2010), tujuan dan manfaat *Good Corporate Governance* antara lain sebagai berikut:

1. Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
2. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir resiko.
3. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
4. Mendorong pengelolaan perbankan secara professional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi dan RUPS.
5. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
6. Menjaga *going concern* perusahaan.

2.2.6 Mekanisme *Corporate Governance*

Syakhoraza (2005) dalam Petronila (2007) dalam bidang pengendalian, membedakan *Corporate Governance mechanism* menjadi dua kelompok yaitu *internal Corporate Governance mechanism* dan *external Corporate governance mechanism*.

1. Mekanisme *Corporate Governance* yang bersifat internal merupakan interaksi antara pihak-pihak pengambil keputusan dalam perusahaan yang mencakup Dewan Direksi (*Board of Director*), Dewan Komisaris (*Board of Commisioner*), *Executive Management* yang di dalamnya termasuk Komite Audit (*Audit Committee*), dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Mekanisme *Corporate Governance* yang bersifat eksternal merupakan interaksi antara pihak-pihak yang mengawasi kinerja perusahaan, antara lain *Stakeholders* (karyawan, konsumen, pemasok, kreditur, masyarakat) dan reputational agents (akuntan, pengacara, badan pemeringkat kredit, manajer investasi).

Organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG (Agoes, 2011:109), yaitu: Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit.

2.2.7 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham (Tjeleni, 2013). Sukirni (2012:5) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan indikator jumlah presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Menurut Riduwan dan Sari (2013) dalam Dewi dan Nugrahanti (2014:70). Pengukuran kepemilikan manajerial dirumuskan sebagai berikut :

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

2.2.8 Kepemilikan Institutional.

Haruman (2008) menyatakan tingginya kepemilikan oleh institusi akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan yang tinggi ini akan meminimalisasi tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan. Apabila tingkat investasi di sebuah perusahaan tinggi, maka akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan pemilik institusional melakukan tindakan *opportunistic* sama halnya dengan pemilik manajerial.

Sukirni (2012:5) mengatakan bahwa kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator jumlah presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Pengukuran kepemilikan institusional mengacu pada Riduwan dan Sari (2013) dalam Dewi dan Nugrahanti (2014:70) sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Jumlah total saham}} \times 100 \%$$

2.2.9 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseoran terbatas (Mulyadi, 2002:185). Kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan saham oleh institusi/perusahaan lain dari seluruh lembar saham perusahaan yang beredar. Dalam penelitian ini diukur dengan jumlah saham yang dimiliki institusi/perusahaan lain dibagi dengan seluruh lembar saham yang beredar. Kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut (Darwis, 2012).

Melalui fungsi monitoring atau sebagai pengawas manajemen di perusahaan, komisaris independen memiliki peranan yang besar dalam membatasi tingkat manajemen laba, karena pengawasan yang dilakukan lebih baik dan bebas dari kepentingan intern perusahaan. Riduwan dan Sari (2013) dalam Dewi dan Nugrahanti (2014:70), pengukuran dewan komisaris independen dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{KI} = \frac{\text{jumlah anggota komisaris independen}}{\text{seluruh anggota dewan komisaris perusahaan}}$$

2.2.10 Komite Audit

Berdasarkan Kep-315/BEJ/06200 komite audit dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat. Tugas dan wewenang komite audit adalah untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap

pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Secara umum Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI) (2001) menjelaskan bahwa komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang yaitu (1) laporan keuangan, (2) *corporate governance*, dan (3) pengawasan perusahaan.

Sejalan dengan tersebut fungsi komite audit menurut Surya dan Yustiavandana (2006:145) dalam Septiana, dkk (2016:149), yaitu untuk membantu komisaris dan dewan pengawas. Komite audit dituntut untuk dapat bertindak independen sebagai pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor.

Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2001, menyatakan bahwa pengertian komite audit adalah suatu badan yang berbeda dibawah komisaris yang sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota komisaris, dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan dan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugas maupun pelaporannya. Komite audit bertanggungjawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas perusahaan (Septiana, dkk 2016:149). Jao (2011:47), mengatakan bahwa komite audit diukur dengan menggunakan:

Komite Audit = Jumlah Anggota Rapat dalam Satu Tahun
--

Sedangkan menurut Pujiningsih (2011:35), komite audit dapat diukur dengan menggunakan :

Komite Audit = Jumlah Anggota Komite Audit di Perusahaan
--

2.2.11 Sustainability Report

Laporan berkelanjutan (*sustainability report*) adalah suatu laporan yang bersifat sukarela (*voluntary*) dan digunakan sebagai pelengkap laporan keuangan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 yaitu perusahaan

dapat mengungkapkan laporan tambahan seperti laporan tentang lingkungan hidup dan laporan nilai tambah khususnya bagi perusahaan yang menganggap jika faktor - faktor lingkungan hidup dan pegawai merupakan peranan yang penting atas laporan tersebut.

Menurut Standart GRI (2020) *Sustainability Report* (laporan keberlanjutan) adalah laporan yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tentang dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari. *Sustainability Report* juga menyediakan nilai-nilai organisasi dan model tata kelola, dan menunjukkan hubungan antara strategi dan komitmennya untuk ekonomi global yang berkelanjutan.

Sustainability report atau laporan berkelanjutan adalah suatu praktik pengukuran, pengungkapan, serta akuntabilitas suatu perusahaan bertanggungjawab atas kinerja perusahaannya untuk pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder baik internal maupun eksternal, selain itu laporan ini juga bisa dikatakan laporan pertanggungjawaban perusahaan dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan (Aziz, 2014).

Menurut Utama dan Mirhard (2016: 1264) *Sustainability Report* merupakan laporan sukarela yang dikeluarkan oleh perusahaan secara terpisah dari laporan tahunan. Laporan tersebut digunakan untuk mendukung perusahaan dalam mengungkapkannya informasi perusahaan mengenai sosial, ekonomi, dan lingkungan. *Sustainability Report* bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggungjawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memperhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. SR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggungjawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Dengan adanya pelaksanaan laporan berkelanjutan SR

akan berdampak pada kesinambungan dari perusahaan (Manusa dan Defung, 2017:175).

Menurut Simbolon dan Memed (dalam Mulpiani, 2019:78) *sustainability report* bagi perusahaan merupakan publikasi informasi yang mencerminkan kinerja organisasi dalam dimensi ekonomi, sosial, lingkungan yang dapat menjadi media bagi perusahaan untuk menginformasikan kinerja organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

2.2.12 Standar Pengungkapan *Sustainability Report*

Berdasarkan *Standardd Global Initiative Reporting (GRI) G4 Guidelines*, pengungkapan *sustainability report* meliputi 3 (tiga) dimensi, yaitu (Bukhori dan Sopian, 2017: 39-41):

1. Ekonomi

Dimensi ekonomi keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada kondisi ekonomi stakeholder dan pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Aspek ekonomi yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan lebih pada kontribusi perusahaan terhadap besar sistem ekonomi. Pengungkapan pendekatan manajemen dapat mencakup tiga aspek ekonomi yaitu indikator ekonomi, keberadaan pasar, dan dampak ekonomi tidak langsung. Ada juga pengungkapan pada kebijakan, tujuan dan informasi terkait tambahan.

2. Lingkungan

Dimensi lingkungan keberlanjutan menyangkut dampak organisasi terhadap hidup dan non-hidup sistem alam, termasuk ekosistem, tanah, udara, dan air. Pengungkapan kinerja lingkungan termasuk pengungkapan pada pendekatan manajemen terdiri dari aspek lingkungan seperti air, bahan energi, keanekaragaman hayati, emisi, limbah, produk dan jasa, kepatuhan, transportasi, dan secara keseluruhan, maka tujuan yang relevan dengan aspek lingkungan, kebijakan,

tanggung jawab pelatihan, organisasi dan kesadaran, monitoring dan tindak lanjut, dan informasi kontekstual tambahan.

3. Sosial

Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial dimana organisasi beroperasi. Kategori sosial berisi sub-kategori:

a. Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja

Dimensi sosial keberlanjutan menyangkut dampak sebuah organisasi pada sistem sosial di mana ia beroperasi. Kinerja tenaga kerja dan pekerjaan layak yang akan dibagi menjadi empat aspek yaitu praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Informasi yang akan diungkapkan akan sama seperti kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan di mana ia terdiri dari pendekatan manajemen, tujuan, kebijakan, tanggung jawab pelatihan, organisasi dan kesadaran, monitoring dan tindak lanjut, dan informasi kontekstual tambahan. Semuanya akan dilaporkan berdasarkan hubungan aspek sosial.

b. Hak Asasi Manusia

Dimensi hak asasi manusia dalam *sustainability report* menyangkut dampak sebuah organisasi menyangkut sejauh mana hak asasi manusia diperhitungkan dalam investasi dan praktek pemilihan supplier/kontraktor. Kinerja hak asasi manusia dibagi menjadi delapan aspek yaitu Praktek Investasi dan Pengadaan, Nondiskriminasi, Kebebasan berserikat dan berkumpul dan Tawar-menawar Kolektif, Penghentian Pekerja Anak, Penghindaran Kerja Paksa dan Kerja Wajib, Praktek Keluhan dan Kedukaan, Praktek Keamanan dan Hak adat. Informasi yang akan diungkapkan terdiri dari pendekatan manajemen, tujuan, kebijakan, tanggung jawab pelatihan, organisasi dan kesadaran, monitoring dan tindak lanjut, dan informasi kontekstual tambahan. Semuanya akan dilaporkan berdasarkan hubungan aspek hak asasi manusia.

c. Masyarakat

Dimensi masyarakat dalam *Sustainability Report* menyangkut dampak organisasi terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi, dan menjelaskan risiko dari interaksi dengan institusi sosial lainnya yang mereka kelola. Kinerja masyarakat dibagi menjadi lima aspek yaitu komunitas, korupsi, kebijakan publik, kelakuan tidak bersaing dan kepatuhan. Informasi yang akan diungkapkan terdiri dari pendekatan manajemen, tujuan, kebijakan, tanggung jawab pelatihan, organisasi dan kesadaran, monitoring dan tindak lanjut, dan informasi kontekstual tambahan. Semuanya akan dilaporkan berdasarkan hubungan aspek masyarakat.

d. Tanggung Jawab Atas Produk

Dimensi tanggung jawab produk menyangkut aspek produk dari organisasi pelapor dan serta jasa yang diberikan yang mempengaruhi pelanggan, terutama, kesehatan dan keselamatan, informasi dan pelabelan, pemasaran, dan privasi. Kinerja tanggung jawab produk akan dibagi menjadi lima aspek yaitu kesehatan dan keselamatan pelanggan, label produk dan jasa, komunikasi pemasaran, privasi pelanggan dan kepatuhan. Informasi yang akan diungkapkan terdiri dari pendekatan manajemen, tujuan, kebijakan, tanggung jawab pelatihan, organisasi dan kesadaran, monitoring dan tindak lanjut, dan informasi kontekstual tambahan. Semuanya akan dilaporkan berdasarkan hubungan aspek masyarakat.

2.2.13 Prinsip *Sustainability Report*

Pengungkapan *Sustainability Report* yang sesuai dengan Standart GRI (Global Reporting Index) harus memenuhi beberapa prinsip. Prinsip-prinsip ini tercantum dalam GRI-G3 Guidelines, yaitu (Manisa dan Defung, 2017: 177-178):

1. Keseimbangan

Sustainability Report sebaiknya mengungkapkan aspek positif dan negatif dari kinerja suatu perusahaan agar dapat menilai secara keseluruhan kinerja dari perusahaan tersebut.

2. Dapat dibandingkan

Sustainability Report berisi isu dan informasi yang ada sebaiknya dipilih, dikompilasi, dan dilaporkan secara konsisten.

3. Akurat

Informasi yang dilaporkan dalam *Sustainability Report* harus cukup akurat dan rinci sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi.

4. Urut Waktu

Pelaporan *Sustainability Report* tersebut harus terjadwal dan informasi yang ada harus selalu tersedia bagi para stakeholder.

5. Kesesuaian

Informasi yang diberikan dalam *Sustainability Report* harus sesuai dengan pedoman dan dapat dimengerti serta dapat diakses oleh stakeholder.

6. Dapat dipertanggungjawabkan

Informasi dan proses yang digunakan dalam penyusunan laporan harus dikumpulkan, direkam, dikompilasi, dianalisis, dan diungkapkan dengan tepat sehingga dapat menetapkan kualitas dan materialitas informasi.

2.2.14 Pengukuran *Sustainability Report*

Variabel *sustainability report* diukur dengan *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI). Perhitungan SRDI dilakukan dengan memberikan skor 1 jika suatu item diungkapkan, dan 0 jika tidak diungkapkan. Setelah dilakukan pemberian skor pada seluruh item, skor tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total skor untuk setiap perusahaan. Rumus SRDI dapat diformulasikan sebagai berikut (Bukhori dan Sopian, 2017:39).

Pengungkapan *sustainability report* didefinisikan sebagai laporan yang diungkapkan oleh perusahaan yang meliputi tema economic, environmental, human

right, labor practices & decent work, society dan produk responsibility (GRI-4). Perhitungan variabel sustainability report dilakukan dengan variabel dummy, dengan memberikan skor 1 jika 1 item diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan. Setelah itu total item yang diungkapkan yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dijumlahkan dan dibagi dengan total item yang diharapkan. Dengan demikian SRDI dapat dihitung sebagai berikut (Jannah dan Kurnia, 2016):

$$SRDI = \frac{V}{M}$$

Keterangan :

SRDI : Sustainability Report Disclosure Index Perusahaan

V : Jumlah item yang diungkapkan perusahaan

M : Jumlah item yang diharapkan

2.3 Pengaruh Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Sustainability Report*

Pada umumnya setiap perusahaan yang menerbitkan saham memiliki tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Kekayaan pemegang saham diukur dengan perkalian antara harga saham dan lembar saham yang beredar. Harga saham merupakan cerminan dari kinerja atau nilai perusahaan dan juga cerminan kepercayaan investor. Harga saham akan bergerak searah dengan kinerja perusahaan. Namun, pihak manajemen sering memiliki tujuan dan kepentingan yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan mengabaikan kepentingan pemegang saham. Perbedaan kepentingan tersebut mengakibatkan munculnya konflik yang disebut *agency conflict*. Konflik keagenan akan mengakibatkan adanya oportunistik manajemen yang akan mengakibatkan laba yang dilaporkan semu, dan menyebabkan nilai perusahaan berkurang dimasa yang akan datang (Herawati, 2008). Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu perlindungan terhadap berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Almilia dan Sifa, 2006).

Corporate Governance hadir sebagai salah satu cara untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pemegang saham (*shareholder*) atau pemilik

perusahaan. Penerapan *corporate governance* pada setiap perusahaan diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen suatu perusahaan, sehingga meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan dan akan berdampak pada harga saham perusahaan. Mekanisme dari *corporate governance* yang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan bagi perusahaan, antara lain kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, dewan komisaris dan kepemilikan asing, selain itu dapat mengukur secara keseluruhan presentasi perusahaan yang telah mengungkapkan sustainability report pada sektor perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

2.3.2 Kepemilikan Manajerial terhadap Sustainability Report

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Rustiarini, 2011). Kepemilikan manajerial yang tinggi berakibat pada rendahnya dividen yang dibayarkan kepada shareholder. Hal ini disebabkan karena pembiayaan yang dilakukan oleh manajemen terhadap nilai investasi di masa yang akan datang bersumber dari biaya internal. Struktur kepemilikan manajerial dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajerial. Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Rusriarini, 2011).

Hal ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menselaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Aktivitas kegiatan perusahaan itu berupa pengungkapan sustainability report. Hal ini sejalan dengan Sudarno (2013) yang mengatakan bahwa kepemilikan saham manajerial yang lebih besar memiliki potensi yang lebih besar untuk mengungkapkan

sustainability report. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Sustainability Report.

2.3.3 Kepemilikan Institusional terhadap Sustainability Report

Kepemilikan institusi yang besar dapat memperbesar kontrol investor terhadap perusahaan, sehingga besarnya kepemilikan saham oleh institusi dapat menjadi salah satu alasan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan sustainability report tersebut diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara agen dan principal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama. Hal ini sejalan dengan Sudarno (2013) yang mengatakan bahwa kepemilikan saham institusi yang lebih besar memiliki potensi yang lebih besar untuk mengungkapkan sustainability report. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Sustainability Report.

2.3.4 Hubungan antara Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan Sustainability Report

Dengan adanya dewan komisaris independen tidak hanya dapat melindungi kepentingan pihak mayoritas tetapi juga pihak minoritas yang juga memiliki kepentingan terhadap perusahaan, yang mana salah satu bentuk perlindungan kepentingan tersebut adalah melakukan pelaporan pertanggungjawaban sosial (Mega, 2013). Hal ini sejalan dengan Mega (2013) yang mengatakan bahwa dewan komisaris independen yang lebih besar memiliki potensi yang lebih besar untuk mengungkapkan sustainability report. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Sustainability Report.

2.3.5 Hubungan Antara Komite Audit terhadap Pengungkapan Sustainability Report

Pengawasan komite audit mendorong pelaksanaan corporate governance yang efektif. Pengawasan secara mendalam dari komite audit mampu mendorong perusahaan untuk melakukan pengawasan yang lebih baik sehingga prinsip-prinsip good corporate governance dapat terpenuhi, salah satunya prinsip transparansi dimana perusahaan diwajibkan untuk terbuka atas segala aktivitas bisnis yang dilakukan dan kemudian melakukan pelaporan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang diprosikan dengan total aset. Perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki kreditur yang lebih banyak dan investor yang lebih banyak (baik investor local maupun asing) dibanding dengan perusahaan yang lebih kecil. Semakin besar perusahaan tentunya juga memiliki kegiatan operasional perusahaan yang semakin besar pula begitu juga dengan tujuan perusahaan akan semakin besar. Besarnya suatu perusahaan cenderung akan mengakibatkan komisaris lebih sering mengadakan pertemuan untuk membahas laporan perusahaan termasuk laporan keuangan dan laporan tanggung jawab sosial, mengingat bahwa perusahaan membutuhkan upaya yang lebih besar untuk memperoleh legitimasi para pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan keselarasan nilai-nilai sosial dari kegiatannya dengan norma perilaku yang ada dalam masyarakat.

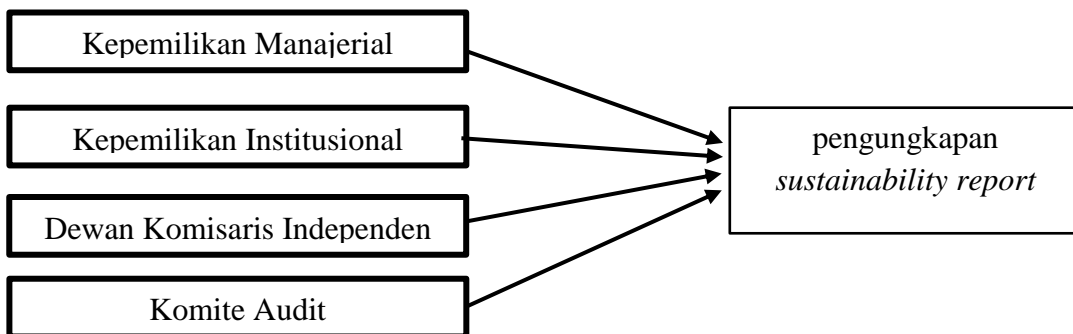
Komite audit semakin mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan sustainability report sebagai media komunikasi perusahaan dengan stakeholder dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan good corporate governance. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Komite Audit Berpengaruh Positif terhadap pengungkapan sustainability report.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan, maka dikembangkan suatu kerangk pemikiran yang menjadi dasar penelitian. Kerangka pemikiran adalah gambaran dari penelitian ini berdasarkan studi teoritis dan empiris yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual Penelitian



- X1** = **Kepemilikan Manajerial**
X2 = **Kepemilikan Institusional**
X3 = **Dewan Komisaris Independen**
X4 = **Komite Audit**
Y = **Sustainability Report**

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa adanya pengaruh kepemilikan manjerial dengan pengungkapan *sustainability report*, kepemilikan institusional dengan pengungkapan *sustainability report*. Komisaris independent dengan pengungkapan *sustainability report*, komite audit dengan pengungkapan *sustainability report*.